

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dari teori yang penulis paparkan pada BAB II dan pembahasan terkait laporan GFS pada Direktorat APK DJPb yang telah penulis jelaskan pada BAB III maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Proses penyusunan GFS dimulai dari tingkat wilayah sesuai PMK 169/PMK01/2012 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.41/PB/2013 sebagai dasar bagi Kanwil DJPB adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Direktorat APK DJPb dalam Menyusun GFS dari Tingkat Wilayah hingga menjadi laporan GFS antara lain:
 - 1) Konversi dan Kompilasi Data Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah:
 - 2) Tahap selanjutnya adalah konsolidasi LKPP dan LKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
 - 3) Agar menjadi laporan sektor publik, selanjutnya Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah
 - 4) *Government Financial Statistik* disusun melalui mapping data akuntansi/laporan keuangan

2. Sistem Informasi Akuntansi khususnya pada laporan GFS yang dilaksanakan oleh pihak Direktorat APK DJPb secara umum telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan teori terkait. Komponen yang diterapkan sudah sesuai dan terbagi dengan jelas. Penggunaan SIKRI yang lengkap dan jelas dari awal LKPK TW hingga akhir berupa laporan GFS.
3. Laporan *Government Financial Statistik* yang terdiri dari empat laporan, meliputi (1) Laporan operasional, (2) Laporan arus ekonomi lainnya, (3) Neraca, yang dapat dikombinasikan untuk menunjukkan semua perubahan posisi keuangan yang berasal dari arus, serta (4) Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, yang menyediakan informasi likuiditas telah terselesaikan dengan baik oleh Direktorat APK DJPb dan menghasilkan laporan GFS berupa Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK).
4. Masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak Direktorat APK DJPb secara umum masih relatif sama jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu berupa Keterbatasan SDM Akuntansi pada satker pemerintah pusat maupun SKPD/PPKD, Kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi akuntansi berbasis teknologi informasi, Keterlambatan penyelesaian LKPD, Perbedaan antara penerapan GFS dengan IFRS